

Dampak Pendapatan Daerah dan Kemandirian Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Brebes Tahun 2012-2021

Ira Amanda Hirbasari^{1*}

¹Baperlitbangda Kabupaten Brebes.

*iraamandahirbasari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Brebes dari Tahun 2012-2021 melalui variabel *intervening* Kemandirian Daerah. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan software SPSS 22. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi data deret waktu (*time series*) tahun 2012-2021 di Kabupaten Brebes. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan kajian pemerintah daerah kabupaten Brebes dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan keuangan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Brebes. Hasil analisis menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, dan Kemandirian Daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Secara Parsial, model 1 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Daerah sementara Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Secara parsial, model 2 menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dana perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan Kemandirian Daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi namun pengaruhnya juga tidak signifikan. Hasil analisis keuangan daerah menunjukkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Brebes masuk dalam kategori kurang. Rasio Ketergantungan menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes masuk dalam kategori sangat tinggi. Rasio Kemandirian daerah menunjukkan hasil bahwa kabupaten Brebes masih masuk dalam kategori rendah sekali yang artinya Pemerintah Kabupaten Brebes belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara baik yang diberikan pemerintah pusat.

Kata Kunci : PAD, Kemandirian Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

Abstract

This study aims to analyze the effect of Regional Revenue consisting of Regional Original Income, Balance Fund and Other Legitimate Income on Economic Growth in Brebes Regency from 2012-2021 through intervening variables of Regional Independence. This study used multiple linear regression analysis with SPSS 22 software. The data used is secondary data which includes time series data for 2012-2021 in Brebes Regency. The results of the analysis show that Regional Original Income, Balance Fund, Miscellaneous Legitimate Income, and Regional Independence simultaneously have a significant effect on Economic Growth. Partially, model 1 shows that Local Native Income has a positive and significant effect on Regional Independence while the Equalization Fund and Other Legitimate Income have a negative and significant effect on regional independence. Partially, model 2 concludes that Local Native Income has a positive and significant effect on economic growth. The Equalization Fund and Other Legitimate Income have a negative but not significant influence on economic growth, while Regional Independence has a positive effect on economic growth but its influence is also insignificant. The results of the regional financial analysis show that the Fiscal Decentralization Degree Ratio of Brebes Regency is included in the category of less. The Dependency Ratio shows that Brebes County falls into the very high category. The regional Independence Ratio shows the results that Brebes district is still included in the very low category, which means that the Brebes Regency Government has not been able to implement regional autonomy properly provided by the central government.

Keywords : PAD, Regional Independence, Economic Growth

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Semakin besar tingkat pembangunan suatu negara, mengindikasikan negara tersebut semakin maju dan

berkembang. Ada beberapa indikator yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisis sebuah pembangunan nasional.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam segala aktivitas perekonomian di suatu negara pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Diantara ketiga komponen tersebut, pendapatan merupakan indikator yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka dari itu pertumbuhan ekonomi memacu pemerintah daerah memaksimalkan pemberdayaan sumber daya potensial yang ada, serta membuka peluang kerja sama masyarakat guna menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang dapat dikatakan dalam kondisi yang baik di tengah kondisi ekonomi global yang sedang lesu. Hal ini tidak terlepas dari adanya peranan pembangunan daerah yang merupakan bagian penting dari pembangunan nasional.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Salah satu penyumbang angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah adalah Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes merupakan salah satu daerah dengan sektor pertanian bawang merah yang menjadi tulang punggung utama dalam memaksimalkan pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah menggunakan PDRB atas dasar harga konstan. Struktur perekonomian di Kabupaten Brebes memiliki karakteristik yang berbeda dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Spesifik perekonomian di Kabupaten Brebes dibangun dengan mengandalkan sektor pertanian khususnya bawang merah. Bawang merah bagi Kabupaten Brebes merupakan trade mark mengingat posisinya sebagai penghasil komoditi bawang merah terbesar di tataran nasional. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes dapat ditunjukkan melalui data PDRB ADHK Kabupaten Brebes tahun 2012 - 2021.

Tabel 1
PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Brebes 2012-2021

Tahun	PDRB	Laju Pertumbuhan Ekonomi
2012	22,482,260,000,000	6.73
2013	23,823,560,000,000	5.97
2014	25,074,170,000,000	5.25
2015	26,572,830,000,000	5.98
2016	27,930,990,000,000	5.11
2017	29,509,210,000,000	5.65
2018	31,060,110,000,000	5.26
2019	32,835,670,000,000	5.72
2020	32,640,970,000,000	-0.59
2021	33,280,540,000,000	1.96

Sumber : Kab Brebes Dalam Angka. 2022

Tabel 1 menunjukkan bahwa rata-rata PDRB ADHK serta laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes selama sepuluh tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup baik meskipun terjadi fluktuasi

khususnya di tahun 2020 dimana laju pertumbuhan ekonomi turun tajam di angka -0.59 yang merupakan efek dari adanya pandemi covid-19 yang juga mengguncang perekonomian dunia.

Secara umum, fluktuasi dari tahun ke tahun yang terjadi menunjukkan bahwa kinerja ekonomi masih kurang baik. Hal ini membuktikan bahwa Kabupaten Brebes belum dapat menunjukkan perubahan yang signifikan dalam peningkatan PDRBnya, meskipun secara garis besar mengalami trend kenaikan.

Pelaksanaan otonomi daerah telah diatur dalam UU No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai wilayah otonom, daerah mempunyai wewenang dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pemberian otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya.

Dalam memenuhi segala kebutuhan masyarakat, langkah yang dilakukan pemerintah daerah adalah berusaha meningkatkan kemampuan keuangan daerah khususnya keuangan yang berasal dari daerah sendiri yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan tingkat kemandirian daerah serta menurunkan angka ketergantungan fiskal terhadap pusat. Peningkatan PAD dilakukan dengan berbagai cara baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

Kemampuan daerah dalam menyediakan anggaran yang berasal dari daerah sangat bergantung pada kemampuan dalam mengelola potensi ekonomi yang ada menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu meningkatkan PAD yang digunakan untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Kurangnya kemampuan daerah dalam menyediakan dana untuk pembangunan daerah menyebabkan pemerintah daerah masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat. Tingginya tingkat ketergantungan daerah memunculkan kebijakan desentralisasi fiskal, yaitu dengan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan pemberian dana yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Kusumawati dan Wiksuana (2018) menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali tahun 2012-2016. PAD paling dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dibanding dengan variabel DAU dan DBH.

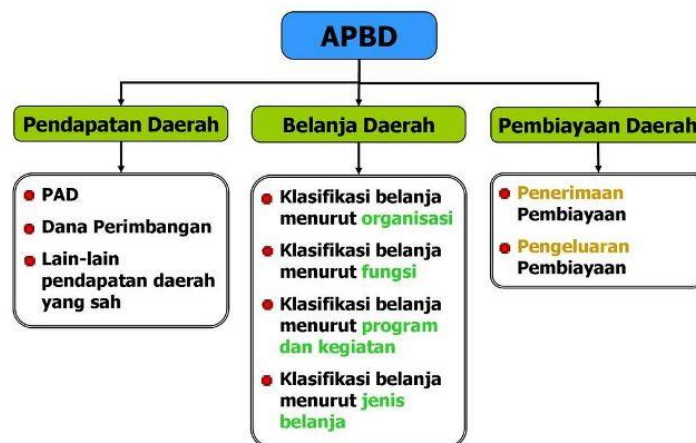
Hasil penelitian Penelitian Megadini (2017) menyimpulkan bahwa kemandirian fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kab/kota Provinsi Jawa Timur, artinya kemandirian fiskal di suatu daerah dapat memberikan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pendapatan daerah yang terdiri dari tiga variabel (PAD, DAPER, LP) terhadap pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian daerah sebagai variabel intervening. Selain itu untuk memperluas analisis, penelitian ini juga melakukan analisis keuangan daerah untuk mengetahui nilai rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan keuangan daerah serta rasio kemandirian daerah di kabupaten Brebes pada periode 2012-2021 di Kabupaten Brebes.

TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Daerah

Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah sebagai berikut:



Pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tak perlu dibayar lagi oleh pemerintah. Pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan asli daerah (PAD), adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Adapun Pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari; Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Daerah dan lain-lainnya.
2. Dana perimbangan, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Adapun dana perimbangan terdiri dari; Bagi Hasil Pajak, Dana Lokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan dari Provinsi (khusus kabupaten/kota).
3. Lain-lain pendapatan yang sah, adalah pendapatan lain-lain yang dihasilkan dari bantuan dan dana penyeimbang dari pemerintah pusat. Rekening ini disediakan untuk mengakuntasikan penerimaan daerah, selain itu juga jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan seperti; hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Penerimaan atas tuntutan ganti rugi daerah dan penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain.

Kemandirian Daerah

Menurut Halim dalam Tahar (2011) kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Selain itu, terdapat empat pola hubungan tingkat kemandirian daerah antara lain: 1) Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada pemerintah daerah. 2) Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat semakin berkurang, karena daerah dianggap sudah mampu melaksanakan otonomi. 3) Pola hubungan partisipatif, yaitu peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. 4) Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat, sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno dalam Tahar (2011) Pertumbuhan Ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang di diproduksi dalam masyarakat bertambah. Terdapat enam ciri pertumbuhan ekonomi yang berdasar pada produk nasional dan komponennya, yaitu : (1) Laju Pertumbuhan Penduduk per Kapita, (2) Peningkatan Produktivitas, (3) Laju perubahan struktural yang tinggi, (4) Urbanisasi, (5) Ekspansi negara maju, (6) Arus barang, modal, dan orang antar bangsa. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan atau kemajuan pembangunan ekonomi disuatu daerah

pada periode tertentu, angka pertumbuhan ekonomi dihitung dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada harga konstan dari tahun ke tahun.

Pendapatan Asli Daerah dan Kemandirian Daerah

Menurut penelitian Setiawan (2021) PAD memiliki pengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, sementara DAU dan DAK tidak memiliki pengaruh. DAU dan DAK tidak memiliki peran dalam meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah. Kondisi ini dapat dipahami karena untuk pengelolaan dan penggunaan DAU dan DAK ini masih ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Hasil penelitian lain yang dilakukan Nindita (2018) menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan belanja modal berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara parsial, PAD berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dan belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Penelitian Saleh (2020) menyimpulkan bahwa PAD secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah kabupaten Bogor periode tahun 2012-2017. PAD dan Dana Perimbangan memiliki kemampuan dalam mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah secara bersama-sama dengan demikian maka semakin meningkatnya PAD dan sedikitnya Dana Perimbangan akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah kabupaten Bogor periode tahun 2012-2017.

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah

Dana Perimbangan dan Kemandirian Daerah

Penelitian Saleh (2020) menyimpulkan bahwa Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah kabupaten Bogor periode 2012-2017. PAD dan Dana Perimbangan memiliki kemampuan dalam mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah secara bersama-sama dengan demikian maka, semakin meningkatnya PAD dan sedikitnya Dana Perimbangan akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Bogor periode 2012-2017.

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H2: Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kemandirian daerah

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dan Kemandirian Daerah

H3: Lain-Lain Pendapatan Yang Sah berpengaruh negatif terhadap kemandirian daerah

Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2020) menyimpulkan bahwa secara parsial PAD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta tahun 2011-2018.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Kusumawati dan Wiksuana (2018) menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali tahun 2012-2016. PAD paling dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dibanding dengan variabel DAU dan DBH.

Sejalan dengan penelitian lainnya, penelitian yang dilakukan oleh Apriana (2021) juga menyimpulkan bahwa PAD secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Malang pada tahun 2010-2019. PAD paling dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dibanding dengan variabel DAK dan DAU

Berdasarkan analisis dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H4: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dana Perimbangan dan Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian yang dilakukan oleh Suci (2014) menyimpulkan bahwa Dana perimbangan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian lain yang dilakukan Megadini (2017) menyimpulkan bahwa Daper berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya besarnya dana perimbangan tidak memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

H5: Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah dan Pertumbuhan Ekonomi

H6: Lain-Lain Pendapatan Yang Sah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi

Penelitian Megadini (2017) menyimpulkan bahwa kemandirian fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kab/kota Provinsi Jawa Timur, artinya kemandirian fiskal di suatu daerah dapat memberikan pertumbuhan ekonomi.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Suci (2014) menyimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan analisis dan penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H7 : Kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan untuk penelitian ini merupakan data sekunder yang meliputi data Keuangan Pemerintah dan data PDRB ADHK di Kabupaten Brebes mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2021. Teknik pengolahan data menggunakan persamaan linear berganda (*multiple regression*) untuk data time series/rentet waktu selama 10 tahun di kabupaten Brebes. Untuk memperoleh taksiran masing-masing variabel maupun parameter, data statistik dan model diolah dengan menggunakan *software* SPSS 22.

Definisi Operational Variabel Penelitian

Terdapat tiga jenis variabel yaitu variabel eksogen, endogen, dan intervening. Variabel PAD, Daper, dan LP merupakan variabel eksogen, variabel kemandirian daerah merupakan variabel intervening, dan variabel pertumbuhan ekonomi merupakan variabel endogen. PAD, Daper, dan LP diukur dengan menghitung angka-angka pada laporan realisasi anggaran dari tahun 2012-2021.

Penelitian ini menguji hipotesis dengan metode regresi linier berganda ditambah dengan analisis kemandirian keuangan daerah. Analisis kemandirian daerah dilihat dari Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Derajat Kemandirian, dan Derajat Ketergantungan. Sedangkan untuk menguji hipotesis menggunakan dua model penelitian, yaitu menguji hipotesis 1,2,dan 3 dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Untuk menguji hipotesis 4,5,6,dan 7 menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$Z = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 Y_1 + \varepsilon$$

Keterangan :

- X1 : Pendapatan Asli Daerah
 X2 : Dana Perimbangan
 X3 : Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
 Y : Kemandirian Daerah
 Z : Pertumbuhan Ekonomi
 α : Konstanta
 β : Koefisien Regresi
 ε : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Statistik Deskriptif

Tabel 2
Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic
PAD	10	101807000000.00	510848264000.00	309193953000.0000	125806841865.94643
Daper	10	1123345000000.00	1907528758000.00	1626582397400.0000	310567734873.54370
LP	10	341927000000.00	846226854000.00	608110652400.0000	175529785846.33694
KD	10	6.95	21.60	13.3430	3.96631
PE	10	2248226000000.00	3328053999999.99	2852103100000.0000	3947204751425.57860
Valid N (listwise)	10				

Sumber : Data Diolah, 2022

Hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 2 menunjukkan bahwa sampel yang diuji sebanyak 70 observasi. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki rata-rata sebesar 309.193.953.000 dengan standar deviasi sebesar 125.806.841.865. Nilai rata-rata yang lebih besar dari nilai standar deviasi memiliki arti bahwa sebaran data bersifat homogen. Nilai standar deviasi yang semakin kecil menunjukkan bahwa jarak rata-rata setiap sampel penelitian terhadap nilai mean juga akan semakin kecil. Adapun nilai terendah sebesar 101.807.000.000 rupiah terjadi pada tahun 2012 dan nilai tertinggi sebesar 510.848.264.000 rupiah terjadi pada tahun 2017.

Variabel Dana Perimbangan (Daper) memiliki rata-rata sebesar 1.625.320.796.100 dengan standar deviasi sebesar 311.894.209.847, nilai maksimum sebesar 1.907.528.758.000, nilai minimum sebesar 1.123.345.000.000, dan standar deviasi sebesar 310.567.734.873. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata Daper di Kabupaten Brebes dari tahun 2012-2021 sebesar 1.625.320.796.100 rupiah. Nilai rata-rata yang lebih besar dari nilai standar deviasi memiliki arti bahwa sebaran data bersifat homogen. Nilai deviasi standar yang semakin kecil menunjukkan bahwa jarak rata-rata setiap sampel penelitian terhadap nilai mean juga akan semakin kecil. Adapun dengan nilai terendah sebesar 1.123.345.000.000 rupiah yang terjadi pada tahun 2012 dan nilai tertinggi sebesar 1.907.528.758.000 rupiah terjadi pada tahun 2019.

Variabel Lain-Lain Pendapatan Yang Sah (LP) memiliki rata-rata sebesar 608.110.652.400 dengan standar deviasi sebesar 175.529.785.846. Nilai rata-rata yang lebih besar dari nilai standar deviasi memiliki arti bahwa sebaran data bersifat homogen. Nilai standar deviasi yang semakin kecil menunjukkan bahwa jarak rata-rata setiap sampel penelitian terhadap nilai mean juga akan semakin kecil. Adapun nilai terendah sebesar 341.927.000.000 rupiah terjadi pada tahun 2012 dan nilai tertinggi sebesar 846.226.854.000 rupiah terjadi pada tahun 2020.

Variabel kemandirian keuangan daerah yang diukur melalui rasio pendapatan asli daerah dengan total pendapatan transfer daerah pada Pemerintah Kabupaten Brebes tahun 2012-2021, memiliki rata-rata sebesar 13.34, nilai maksimum sebesar 21.60, nilai minimum sebesar 6.95, dan standar deviasi sebesar 3.96. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Brebes pada tahun 2012-2021 sebesar 13.34. Adapun nilai terendah sebesar 6.95 terjadi pada tahun 2012 dan nilai tertinggi sebesar 21.60 terjadi pada tahun 2017. Persebaran data penelitian ini baik, hal tersebut ditunjukkan dengan nilai standar deviasi sebesar 3.96 lebih kecil dari nilai mean. Nilai rata-rata yang lebih besar dari nilai standar deviasi memiliki arti yaitu sebaran data bersifat homogen. Nilai deviasi standar yang semakin kecil menunjukkan bahwa jarak rata-rata setiap sampel penelitian terhadap nilai mean juga akan semakin kecil.

Variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) memiliki rata-rata sebesar 28.521.031.000.000 dengan standar deviasi sebesar 3.947.204.751.425. Nilai rata-rata yang lebih besar dari nilai standar deviasi memiliki arti bahwa sebaran data bersifat homogen. Nilai standar deviasi yang semakin kecil menunjukkan bahwa jarak rata-rata setiap sampel penelitian terhadap nilai mean juga akan semakin kecil. Adapun nilai terendah sebesar 22.482.260.000.000 rupiah terjadi pada tahun 2012 dan nilai tertinggi sebesar 33.280.539.999.999 rupiah terjadi pada tahun 2021.

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data yang digunakan berdistribusi normal. Karena sampel data berjumlah dibawah 200, maka pengujian normalitas menggunakan Uji *Shapiro-Wilk*. Uji *Shapiro-Wilk* dilakukan dengan melihat nilai Sig. dari *Tests of Normality*. Dasar pengambilan keputusan dalam Uji *Shapiro-Wilk* adalah jika nilai Sig. > 0.05 maka data tersebut berdistribusi normal. Hasil uji normalitas menunjukkan angka 0.411 maka, dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal (H_0 diterima).

Tabel 3
Uji Normalitas

	Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.
Pertumbuhan Ekonomi	.926	10	.411

Sumber : Data Diolah, 2022

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas di dalam suatu model regresi, dapat melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan nilai tolerance. Dasar pengambilan keputusan dalam Uji Multikolinieritas adalah :

- Jika nilai VIF < 10 atau nilai Tolerance $> 0,01$, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinieritas.
- Jika nilai VIF > 10 atau nilai Tolerance $< 0,01$, maka dinyatakan terjadi multikolinieritas.

Tabel 4

Hasil Uji Multikolinieritas Model 1

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD	.233	4.295
Daper	.217	4.618
LP	.447	2.239

a. Dependent Variable: KD
 Sumber : Data Diolah, 2022

Tabel hasil uji multikolinieritas model 1 menunjukkan bahwa nilai Tolerance untuk variabel PAD, Daper, dan LP masing-masing lebih besar dari 0.01. Sementara nilai VIF untuk variabel PAD, Daper, dan LP, masing-masing lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas pada masing-masing model regresi.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas Model 2

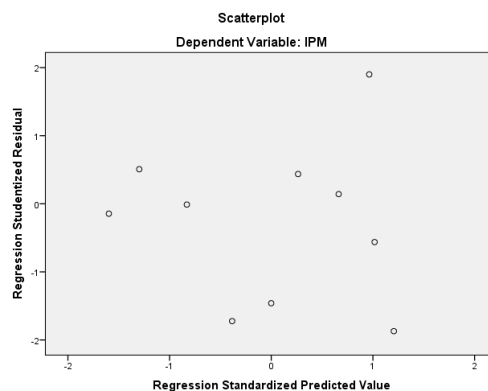
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
PAD	.070	8.208
Daper	.060	6.645
LP	.198	5.046
KD	.025	6.802

a. Dependent Variable: PE
 Sumber : Data Diolah, 2022

Tabel hasil uji multikolinieritas model 2 menunjukkan bahwa nilai Tolerance untuk variabel PAD, Daper, LP, dan KD masing-masing lebih besar dari 0.01. Sementara nilai VIF untuk variabel PAD, Daper, LP, dan KD masing-masing lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas pada masing-masing model regresi.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan *variance* dari nilai residual pada suatu periode pengamatan ke periode pengamatan lainnya. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heterokedastisitas antara lain dengan melihat pola gambar *scatteredplots*.



Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan output *scatteredplots* diatas didapatkan hasil bahwa :

- a. Titik data penyebar berada di atas atau di bawah nilai 0.
- b. Titik tidak hanya mengumpul di atas atau di bawah saja.
- c. Penyebaran titik data tidak membentuk pola bergelombang melebar lalu menyempit dan melebar kembali.
- d. Penyebaran titik data tidak berpola.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas, sehingga model regresi yang baik dan ideal dapat terpenuhi.

4. Hasil Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode (t) dengan periode sebelumnya (t-1). Metode yang digunakan adalah uji *Run Test* yaitu menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi.

Jika nilai *Asymp. Sig. (2 tailed) > 0.05* maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Namun jika nilai *Asymp. Sig. (2 tailed) < 0.05* maka terdapat gejala autokorelasi.

Tabel 6
Hasil Uji Autokorelasi Model 1

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-.08210
Cases < Test Value	5
Cases >= Test Value	5
Total Cases	10
Number of Runs	5
Z	-.335
Asymp. Sig. (2-tailed)	.737

a. Median

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* model 1 sebesar 0.737. Nilai tersebut lebih besar dari 0.05 maka, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi pada model regresi.

Tabel 7
Hasil Uji Autokorelasi Model 2

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-42057284143.87109
Cases < Test Value	5
Cases >= Test Value	5
Total Cases	10
Number of Runs	6
Z	.000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1.000

a. Median

Sumber : Data Diolah, 2022

Berdasarkan hasil pengujian, diketahui nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* model 2 sebesar 1.000. Nilai tersebut lebih besar dari 0.05 maka, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi pada model regresi.

C. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini ada tiga yaitu uji statistik F, uji koefisien determinasi berganda (R^2), dan uji t (pengujian parsial terdapat pada Tabel 8).

1. Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen yang digunakan dalam penelitian terhadap variabel dependen (Winarno, 2015). Berdasarkan Tabel 5.1 didapatkan nilai R-square model 1 sebesar 0,985. Nilai tersebut menunjukkan bahwa PAD, Daper, dan LP mampu menjelaskan variabel kemandirian keuangan daerah sebesar 98,5%, sedangkan sisanya 1,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil ini menunjukkan hasil yang sangat baik karena mendekati angka 100%.

Tabel 8
Uji Koefisien Determinasi Model 1

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.993 ^a	.985	.978	.58564

a. Predictors: (Constant), LP, PAD, Daper

b. Dependent Variable: KD

Sumber : Data Diolah, 2022

Hasil pengujian model 2 menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0.932, jika di presentasikan sebesar 93.2%. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel PAD, Daper, LP dan KD dalam menjelaskan variabel PE sebesar 93.2%, sisanya sebesar 6.8% dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Hasil ini menunjukkan hasil yang sangat baik karena mendekati angka 100%.

Tabel 9
Uji Koefisien Determinasi Model 2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.965 ^a	.932	.877	1383539773646.80500

a. Predictors: (Constant), KD, LP, Daper, PAD

b. Dependent Variable: PE

Sumber : Data Diolah, 2022

2. Uji F

Uji statistik F dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah model penelitian yang digunakan tepat atau tidak. Penelitian ini menggunakan nilai signifikansi F pada tingkat 5%. Hasil pengujian statistik F menunjukkan nilai probabilitas F statistik sebesar 16.89 dengan nilai Sig. sebesar 0.004. Nilai tersebut lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi 0.05, maka persamaan pada model penelitian dapat digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis selanjutnya. Model penelitian cukup baik dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Kemudian dapat disimpulkan bahwa PAD, Daper, LP, dan KD secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Tabel 10
Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	130562649985249010000000000.000	4	32640662496312254000000000.000	16.893	.004 ^b
Residual	96611781618410030000000000.000	5	19322356323682005000000000.000		
Total	140223828147090010000000000.000	9			

a. Dependent Variable: Pertumbuhan Ekonomi

b. Predictors: (Constant), Kemandirian Daerah, Lain Pendapatan, Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah
 Sumber : Data Diolah, 2022

3. Uji t

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Dalam pengujian ini, variabel independen dapat dikatakan mempengaruhi variabel dependen apabila nilai probabilitas kurang dari tingkat signifikansinya yaitu 5% dilihat secara parsial. Hasil pengujian statistik t ditunjukkan Tabel 4.9 dan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 11
Uji t Model 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.608	1.332		7.965	.000
PAD	4.591E-11	.000	1.456	14.277	.000
Daper	-5.340E-12	.000	-.418	-3.953	.008
LP	-4.564E-12	.000	-.202	-2.743	.034

a. Dependent Variable: KD
 Sumber : Data Diolah, 2022

Hipotesis 1 :

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel *Pendapatan Asli Daerah (PAD)* adalah $14.277 > t$ tabel 1,833 dengan nilai Sig. $0.00 < \alpha$ (0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap KD. Jika PAD ditingkatkan, maka Kemandirian Daerah juga akan meningkat. Nilai *standardised coefficient beta* 1.456 berarti bahwa setiap peningkatan PAD sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan derajat kemandirian daerah sebesar 1.456 persen.

Pemerintah daerah kabupaten Brebes berhasil mengoptimalkan PAD yang dimiliki untuk meningkatkan angka Kemandirian Daerah walaupun tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah (perhitungan pada rasio kemandirian daerah). Pemerintah daerah Kabupaten Brebes harus terus berupaya mencari langkah-langkah terobosan baru, agar PAD yang diperoleh semakin besar. PAD yang besar akan menyebabkan kemandirian daerah juga semakin besar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Saleh (2020) menyimpulkan bahwa PAD secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah kabupaten Bogor periode tahun 2012-2017. PAD dan Dana Perimbangan memiliki kemampuan dalam mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah secara bersama-sama. Dengan demikian, maka semakin meningkatnya PAD akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah kabupaten Bogor periode tahun 2012-2017.

Hipotesis 2 :

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel *Dana Perimbangan (Daper)* adalah $-3.953 > t$ tabel 1,833 dengan nilai Sig. $0.008 < \alpha$ (0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap KD. Apabila Dana Perimbangan ditingkatkan, maka Kemandirian Daerah akan menurun. Nilai *standardised coefficient beta* (-0.418) berarti bahwa setiap peningkatan dana perimbangan sebesar 1 persen, maka akan menurunkan derajat kemandirian daerah sebesar 0.418 persen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Saleh (2020) menyimpulkan bahwa Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah kabupaten Bogor periode tahun 2012-2017. Dana Perimbangan memiliki kemampuan dalam mempengaruhi

Kemandirian Keuangan Daerah secara simultan bersama dengan PAD. Dengan demikian, maka semakin sedikitnya Dana Perimbangan akan meningkatkan kemandirian keuangan daerah pada pemerintah daerah kabupaten Bogor periode tahun 2012-2017.

Hipotesis 3 :

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel *Lain-lain Pendapatan yang Sah (LP)* adalah $-2.743 > t$ tabel 1,833 dengan nilai Sig. $0.034 < \alpha$ (0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa *Lain-lain Pendapatan yang Sah* berpengaruh secara signifikan terhadap KD. Apabila variabel *Lain-lain Pendapatan yang Sah* ditingkatkan, maka Kemandirian Daerah akan menurun. Nilai *standardised coefficient beta* negatif (-0.202) berarti bahwa setiap peningkatan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebesar 1 persen, maka akan menurunkan derajat kemandirian daerah sebesar 0.202 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Brebes telah berhasil mengurangi tingkat ketergantungan keuangan dari pusat meskipun rasio ketergantungan daerah masih rendah. Kedepannya, diharapkan pemerintah kabupaten brebes dapat lebih meningkatkan PAD agar ketergantungan dari pusat dapat berkurang sehingga dapat meningkatkan angka kemandirian daerah.

Tabel 12
Uji t Model 2

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	18643255164891.710	10703730765721.553		1.742	.142
PAD	36.765	44.927	1.172	12.818	.045
Daper	-3.394	6.058	-.267	-2.360	.140
LP	-5.626	5.902	-.250	-2.153	.138
KD	781738314116.371	964461219932.272	.786	.811	.145

a. Dependent Variable: PE
Sumber : Data Diolah, 2022

Hipotesis 4 :

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel *Pendapatan Asli Daerah (PAD)* adalah $12.818 > t$ tabel 1,833 dengan nilai Sig. $0.045 < \alpha$ (0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Apabila variabel PAD ditingkatkan, maka Pertumbuhan Ekonomi akan meningkat. Nilai *standardised coefficient beta* 1.172 berarti bahwa setiap peningkatan PAD sebesar 1 persen, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 1.172 persen.

Hasil penelitian ini konsisten dengan Penelitian lain yang dilakukan oleh Kusumawati dan Wiksuana (2018) menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali tahun 2012-2016. PAD paling dominan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dibanding dengan variabel DAU dan DBH.

Hipotesis 5 :

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel *Dana Perimbangan* adalah $-2.360 > t$ tabel 1,833 dengan nilai Sig. $0.140 > \alpha$ (0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa *Dana Perimbangan* memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Apabila variabel *Dana Perimbangan* ditingkatkan, maka Pertumbuhan Ekonomi akan menurun namun penurunannya tidak signifikan. Nilai *standardised coefficient beta* (-2.360) berarti bahwa setiap peningkatan *Dana Perimbangan* sebesar 1 persen, maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar -2.360 persen.

Penelitian Saleh (2020) menyimpulkan bahwa Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah kabupaten Bogor periode 2012-2017.

Hipotesis 6 :

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel *Lain-Lain Pendapatan Yang Sah* adalah $-2.153 > t$ tabel 1,833 dengan nilai Sig. $0.138 > \alpha$ (0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa *Lain-Lain Pendapatan Yang Sah* memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Apabila variabel *Lain-Lain Pendapatan Yang Sah* ditingkatkan, maka Pertumbuhan Ekonomi akan menurun namun penurunannya tidak signifikan. Nilai *standardised coefficient beta* (-2.360) berarti bahwa setiap peningkatan *Dana Perimbangan* sebesar 1 persen, maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar -2.360 persen.

Hipotesis 7 :

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung untuk variabel *Kemandirian Daerah (KD)* adalah $8,11 > t$ tabel 1,833 dengan nilai Sig. $0.145 > \alpha$ (0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa *Kemandirian Daerah* memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PE. Apabila variabel *Kemandirian Daerah* ditingkatkan, maka Pertumbuhan Ekonomi akan meningkat namun peningkatannya tidak signifikan. Nilai *standardised coefficient beta* 0.786 berarti bahwa setiap kenaikan nilai variabel KD sebesar 1 persen, akan meningkatkan PE sebesar 0.786 persen.

Hasil penelitian ini konsisten dengan Penelitian lain yang dilakukan oleh Penelitian Megadini (2017) menyimpulkan bahwa kemandirian fiskal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kab/kota Provinsi Jawa Timur, artinya kemandirian fiskal di suatu daerah dapat memberikan pertumbuhan ekonomi.

Analisis Keuangan Daerah

1. Rasio Desentralisasi Fiskal

Rasio desentralisasi fiskal adalah ukuran untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan. Berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan, besarnya rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Brebes nampak pada tabel berikut:

Tabel 13
Rasio Desentralisasi Keuangan Daerah Kabupaten Brebes

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Derajat Desentralisasi Fiskal	Keterangan
2012	101,807,000,000	1,567,078,000,000	6.50	Sangat Kurang
2013	133,836,000,000	1,781,873,000,000	7.51	Sangat Kurang
2014	226,120,338,000	2,043,992,182,000	11.06	Kurang
2015	279,714,597,000	2,432,876,271,000	11.50	Kurang
2016	327,746,320,000	2,785,284,383,000	11.77	Kurang
2017	510,848,264,000	2,875,777,806,000	17.76	Kurang
2018	356,089,882,000	2,814,882,461,000	12.65	Kurang
2019	372,172,398,000	3,058,498,119,000	12.17	Kurang
2020	398,649,681,000	3,129,412,939,000	12.74	Kurang
2021	384,955,050,000	3,090,630,050,000	12.46	Kurang
Rerata	309,193,953,000	2,558,030,521,100	11.61	Kurang

Sumber : BPKAD Kabupaten Brebes 2012-2021. Data Diolah

Jumlah rata-rata rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Brebes adalah 11.61 persen. Ini menggambarkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Brebes belum mampu menjalankan kewenangan dan tanggung jawab dalam desentralisasi fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan di daerah.

2. Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan adalah ukuran tingkat kemampuan daerah dalam membiayai aktivitas pembangunan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah (Mahmudi, 2010). Hasil analisis yang dilakukan diperoleh data ketergantungan keuangan daerah kabupaten terlihat pada tabel berikut:

Tabel 14
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Brebes

Tahun	Dana Perimbangan	Total Pendapatan Daerah	Rasio Ketergantungan	Keterangan
2012	1,123,345,000,000	1,567,078,000,000	71.68	Sangat Tinggi
2013	1,248,282,000,000	1,781,873,000,000	70.05	Sangat Tinggi
2014	1,325,139,186,000	2,043,992,182,000	64.83	Sangat Tinggi
2015	1,407,033,866,000	2,432,876,271,000	57.83	Sangat Tinggi
2016	1,907,528,758,000	2,785,284,383,000	68.49	Sangat Tinggi
2017	1,784,498,941,000	2,875,777,806,000	62.05	Sangat Tinggi
2018	1,778,517,335,000	2,814,882,461,000	63.18	Sangat Tinggi
2019	1,906,336,471,000	3,058,498,119,000	62.33	Sangat Tinggi
2020	1,884,536,404,000	3,129,412,939,000	60.22	Sangat Tinggi
2021	1,887,990,000,000	3,090,630,050,000	61.09	Sangat Tinggi
Rerata	1,625,320,796,100	2,558,030,521,100	64.18	Sangat Tinggi

Sumber : BPKAD Kabupaten Brebes 2012-2021. Data Diolah

Hasil analisis menunjukkan bahwa rasio ketergantungan kabupaten Brebes selama 10 (sepuluh) tahun, rata-rata adalah sebesar 64.18 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten Brebes terhadap daerah lain melalui pemerintah pusat (dana perimbangan) masih sangat tinggi.

3. Rasio Kemandirian

Menurut Mardiasmo (2002) kemandirian keuangan suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio kemandirian. Rasio kemandirian menggambarkan derajat kemandirian suatu daerah dengan mengukur seberapa besar penerimaan yang berasal dari daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah. Hasil perhitungan kemandirian keuangan daerah kabupaten Brebes nampak terlihat pada tabel berikut:

Tabel 15
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Brebes

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Rasio Kemandirian	Keterangan	Pola Hubungan
2012	101,807,000,000	1,123,345,000,000	9.06	Rendah Sekali	Instruktif
2013	133,836,000,000	1,248,282,000,000	10.72	Rendah Sekali	Instruktif
2014	226,120,338,000	1,325,139,186,000	17.06	Rendah Sekali	Instruktif
2015	279,714,597,000	1,407,033,866,000	19.88	Rendah Sekali	Instruktif
2016	327,746,320,000	1,907,528,758,000	17.18	Rendah Sekali	Instruktif

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Dana Perimbangan	Rasio Kemandirian	Keterangan	Pola Hubungan
2017	510,848,264,000	1,784,498,941,000	28.63	Rendah	Konsultif
2018	356,089,882,000	1,778,517,335,000	20.02	Rendah Sekali	Instruktif
2019	372,172,398,000	1,906,336,471,000	19.52	Rendah Sekali	Instruktif
2020	398,649,681,000	1,884,536,404,000	21.15	Rendah Sekali	Instruktif
2021	384,955,050,000	1,887,990,000,000	20.39	Rendah Sekali	Instruktif
Rerata	309,193,953,000	1,625,320,796,100	19.02	Rendah Sekali	Instruktif

Sumber : BPKAD Kabupaten Brebes 2012-2021. Data Diolah

Data menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Brebes setiap tahunnya mencapai persentase dibawah 25 persen. Jumlah nilai rata-rata tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Brebes rata-rata sebesar 19.02 persen, artinya peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah, atau bisa dikatakan Pemerintah Kabupaten Brebes belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara baik yang diberikan pemerintah pusat.

Jika dilihat dari pola hubungan tingkat kemampuan daerah maka, kemandirian keuangan daerah kabupaten Brebes dikategorikan rendah sekali dan pola hubungannya Instruktif.

KESIMPULAN

Dari penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Dari ketiga sumber pendapatan daerah, PAD adalah yang memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten Brebes. Sedangkan Daper dan LP memiliki pengaruh negatif terhadap kemandirian daerah.
2. PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara Daper dan LP berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi PAD yang ada di Kabupaten Brebes, menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi daerah juga semakin tinggi.
3. Kemandirian Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi namun nilainya tidak signifikan yang artinya peningkatan nilai KD tidak serta merta meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut didapat melalui peningkatan PAD.
4. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Brebes masuk dalam kategori kurang. Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Brebes belum mampu menjalankan kewenangan dan tanggung jawab dalam desentralisasi fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan di daerah.
5. Rasio Ketergantungan menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes masuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah kabupaten Brebes terhadap daerah lain melalui pemerintah pusat (dana perimbangan) masih sangat tinggi.
6. Rasio Kemandirian daerah menunjukkan hasil bahwa kabupaten Brebes masih masuk dalam kategori rendah sekali yang artinya Pemerintah Kabupaten Brebes belum mampu melaksanakan otonomi daerah secara baik yang diberikan pemerintah pusat.

SARAN

Upaya yang bisa dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Brebes dalam mengoptimalkan PAD agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu :

1. Intensifikasi, yaitu suatu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada (diintensifkan). Diintensifkan dalam arti operasional pemungutannya,

2. Pengawasan (untuk melihat kebocoran), tertib administrasi dan mengupayakan Wajib Pajak yang belum kena pajak supaya dapat dikenakan pajak. Ekstensifikasi, yaitu mengoptimalkan PAD dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak,
3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yaitu merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan redistribusi ini sudah merupakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap negara, untuk itu perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan masyarakat yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusumawati, Lily dan Wiksuana, I Gusti. 2018. "Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali". *E-Jurnal Manajemen UNUD, Vol.7, No.5*
- Marizka.2013. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatra Barat tahun 2006-2011". *Jurnal Akuntansi Vol.1, No. 3 (2013) : Seri G. Universitas Negeri Padang.*
- Megadini, Dian Dewi dan Susilo. 2017. "Analisis Pengaruh Kemandirian Fiskal, Dana Perimbangan dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah" (Studi Kasus : Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Timur Periode 2012-2014. *Jurnal*
- Nindita, Nareswari Listya dan Rahayu, Sri. 2018. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, serta Belanja Modal terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten /Kota Provinsi Jawa Barat". *Journal Accounting and Finance Edisi Vol. 2 No. 1 Maret 2018. Universitas Telkom.*
- Setiawan, Puguh dkk. 2021. "Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2010-2016". *Menara Ekonomi, ISSN : 2407-8565; E-ISSN: 2579-5295*
Volume VII No. 1 – April 2021
- Rori, Chindy Febry, dkk. 2016. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013". *Jurnal Berkala ilmiah Efisiensi Vol. 16 No 02 Tahun 2016*
- Saleh, Rahmat.2020. "Pengaruh PAD dan Daper terhadap kemandirian keuangan pemerintah daerah". *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik Vol. 15 No. 2 Juli 2020 : 111-134. Institute Pertanian Bogor.*
- Sisilia, Maria dan Harsono. 2021."Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang Tahun 2010-2019. *Journal of Regional Economics Indonesia, Vol.2, No.1, 2021 :57-70*
- Suci, Stannia Cahaya dan Asmara, Alla. 2014. "Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, hlm 8-22 Vol. 3 No. 1. Institut Pertanian Bogor.*

Tahar, Afrizal dkk. 2011. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah”. *Jurnal Akuntansi dan Investasi Vol. 12 No. 1, halaman: 88-99, Januari 2011.*

Wahyuni, Anita Sri. 2020. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta”. *Jurnal STEI Ekonomi, Vol XX, No. XX, Juli 2020.*